



DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Penyusunan rencana kerja dan anggaran pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terarah, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan regulasi, ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengalami penyempurnaan dan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur secara komprehensif mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selain itu, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pedoman teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, transparan, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang optimal.

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mengacu pada target capaian kinerja sesuai dengan yang tertera pada dokumen Renstra dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar melalui beberapa tahapan yaitu Tim Penyusunan Renja, Penyusunan Agenda Kerja, Penyiapan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, melakukan analisa dan evaluasi serta mengidentifikasi kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2026 sesuai analisa dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perencanaan kinerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diawali dengan pendahuluan yang memuat latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan; dilanjutkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang telah diraih; kemudian memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah; selanjutnya menjabarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah yang memuat indikator kinerja, target, serta pagu anggaran; dan diakhiri dengan penutup yang berisi harapan serta komitmen dalam pelaksanaan rencana kerja guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan langkah strategis dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan secara sistematis, terarah, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah. Dengan komitmen dan sinergi seluruh pihak terkait, pelaksanaan rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Palembang, 04 - Agustus - 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Herdi Apriansyah, S.STP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197604251994121001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. bahwa setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari tahapan sistem penganggaran.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan Renja SKPD diperlukan beberapa tahapan penting agar dokumen yang dihasilkan bersifat partisipatif, terukur, dan akuntabel. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
- d. Penetapan Renja SKPD.

Melalui tahapan-tahapan tersebut diharapkan Renja SKPD dapat memuat program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, menjawab isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penyusunan Renja SKPD menjadi langkah strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan RENJA Perangkat Daerah, sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1169).

1.3 Maksud dan Tujuan

Mengevaluasi dan mengidentifikasi Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berbasis pada kinerja dan mengacu pada arah kebijakan Pemerintah serta Rencana Strategis SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 memuat beberapa bab pokok yaitu:

BAB I Memuat hal-hal umum tentang pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.

BAB II Memuat evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan.

BAB III Memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup yang memuat catatan-catatan dan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun lalu dilaksanakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mendukung urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan pertanahan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun lalu telah berjalan cukup baik, dengan uraian sebagai berikut:

2.1.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk melihat evaluasi capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 1 (satu) tahun terakhir (n-1), dapat dilihat pada lampiran. Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025 dievaluasi Pencapaian Programnya sebagai berikut :

a) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pelaksanaan program pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Capaian program ini secara fisik sebesar 99% dengan realisasi keuangan sebesar 37,76%.

b) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah garapan tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan. Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan sebesar 96,81%.

c) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pelaksanaan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan sebesar 79,29%.

d) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Pelaksanaan program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan

dan 3 sub kegiatan dengan target meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA). Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan sebesar 93,05%.

e) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pelaksanaan program pengelolaan tanah kosong tahun 2025 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target meningkatnya pengelolaan tanah kosong tanah kosong. Capaian program ini secara fisik sebesar 99% dengan realisasi keuangan 85,23%.

f) Program Penatagunaan Tanah

Pelaksanaan program penatagunaan tanah tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Capaian program ini secara fisik sebesar 99% dengan realisasi keuangan 90,74%.

g) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi tahun 2025 terdiri dari 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan target meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) perangkat daerah, meningkatnya kualitas tata kelola penganggaran dan keuangan perangkat daerah, meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian, meningkatnya kualitas tata kelola BMD perangkat daerah. Capaian program ini secara fisik sebesar 99,68% dengan realisasi keuangan sebesar 95,60%

h) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2025 terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan target meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Capaian program ini secara fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 85,39%.

i) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan target meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Capaian program ini secara fisik sebesar 99% dengan realisasi keuangan sebesar 83,07%.

j) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pelaksanaan program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan 99,26%.

- k) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan. Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan sebesar 97,61%.

- l) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Pelaksanaan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terinventarisir. Capaian program ini secara fisik sebesar 99% dengan realisasi keuangan sebesar 98,15%.

- m) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pelaksanaan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan target meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup. Capaian program ini secara fisik sebesar 74% dengan realisasi keuangan 90,12%.

- n) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan target meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian program ini secara fisik sebesar 98,8% dengan realisasi keuangan 95,29%.

- o) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program penanganan pengaduan lingkungan hidup terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target meningkatnya

penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup. Capaian program ini secara fisik sebesar 98% dengan realisasi keuangan 94,38%.

p) Program Pengelolaan Persampahan

Pelaksanaan program pengelolaan persampahan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan target meningkatnya tata kelola persampahan. Capaian program ini secara fisik sebesar 98,5% dengan realisasi keuangan 74,11%.

2.2.1 Realisasi Keuangan

Total Pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar Rp51.920.073.912,00.

Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi keuangan mencapai Rp49.220.075.205,00 atau sebesar 94,80% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Realisasi keuangan pada APBD-P tahun 2025 per program/kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pagu anggaran Rp192.719.597,00
Realisasi Rp72.774.785,00 (37,76%)
- b) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Pagu anggaran Rp50.079.435,00
Realisasi Rp48.482.000,00 (96,81%)
- c) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Pagu anggaran Rp88.381.493,00
Realisasi Rp70.074.998,00 (79,29%)
- d) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Pagu anggaran Rp113.216.966,00
Realisasi Rp 105.351.722,00 (93,05%)
- e) Program Pengelolaan Tanah Kosong
Pagu anggaran Rp143.640.445,00
Realisasi Rp122.421.677,00 (85,23%)
- f) Program Penatagunaan Tanah

- Pagu anggaran Rp80.767.445,00
Realisasi Rp73.287.063,00 (90,74%)
- g) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Pagu anggaran Rp47.401.945.272,50
Realisasi Rp45.316.389.838,00 (95,60%)
- h) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pagu anggaran Rp1.777.305.554,00
Realisasi Rp1.517.647.343,00 (85,39%)
- i) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pagu anggaran Rp95.553.955,30
Realisasi Rp79.372.309,00 (83,07%)
- j) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Pagu anggaran Rp101.092.000,00
Realisasi Rp100.341.488,00 (99,26%)
- k) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Pagu anggaran Rp269.230.109,00
Realisasi Rp262.797.878,00 (97,61%)
- l) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Pagu anggaran Rp12.000.000,00
Realisasi Rp11.777.998,00 (98,15%)
- m) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pagu anggaran Rp561.221.561,00
Realisasi Rp505.768.457,00 (90,12%)
- n) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pagu anggaran Rp629.931.592,00
Realisasi Rp600.279.891,00 (95,29%)
- o) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Pagu anggaran Rp170.915.487,00
Realisasi Rp161.308.685,00 (94,38%)
- p) Program Pengelolaan Persampahan
Pagu anggaran Rp232.073.000,00
Realisasi Rp171.999.073,00 (74,11%)

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Berikut indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai penunjang perangkat daerah:

a) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030, pencapaian dan target indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target dan Realisasi						
			2025		2026	2027	2028	2029	2030
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,19	75.15	68,44	68,70	68,95	69,20	69,46
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase	95	90	95	95	95	95	95
3	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase	18,50	n/a	19,41	20,52	21,77	22,87	24,12
4	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase	31,02	32	34,50	39,97	45,01	44,59	49,84
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	45	2 Kab	52	52,5	53	53,5	54
6	Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah(%))	Persentase	21	3,6	21,5	23	25	35	36
7	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	Persentase	43	-	44	45	46	62	63

b) Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang diukur dengan keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi}}{\text{Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung}} \times 100$	72%
		$\frac{18}{25} \times 100$	

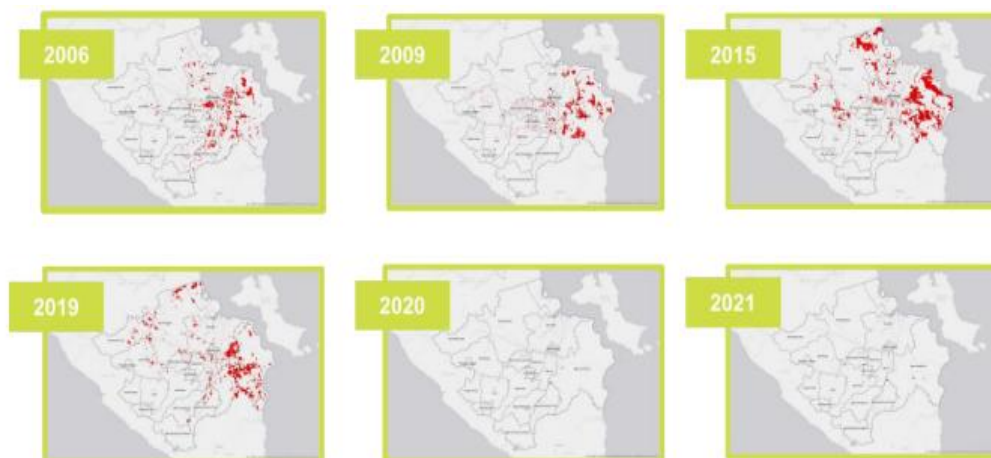
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan DLHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat sejumlah permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian:

1. Tingginya Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam wilayah yang memiliki resiko kebakaran hutan dan lahan tinggi berdasarkan Indeks Resiko Bencana, hal tersebut juga dikonfirmasi dengan kejadian karhutla yang cukup intens terutama saat musim kemarau ditambah lagi dengan terjadinya El Nino yang merupakan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia. Gambaran areal lahan yang terbakar di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2006 – 2021 ditampilkan pada Gambar II.2.

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kejadian kebakaran di Sumatera Selatan masih membutuhkan upaya mitigasi dalam mencegah terjadinya kebakaran. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun yang paling luas, mencapai 727,174 ha hampir 10% wilayah Sumatera Selatan. Diikuti dengan tahun 2019 dengan total luas area terbakar sebanyak 428.462 ha, berkurang hampir 50% dari tahun 2017. Dan pada tahun berikutnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir, didukung juga dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak lain seperti peningkatan sedimentasi sungai dan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.



Gambar II.1. Gambaran Areal Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2021

2. Timbulan Sampah

Berdasarkan potret pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Selatan saat ini, permasalahan yang menonjol adalah masih bercampurnya sampah organik dan anorganik sehingga sulit dimanfaatkan kembali. Padahal sampah organik yang komposisinya mencapai 56,9% berpotensi diolah menjadi kompos, namun kualitasnya menurun ketika tercampur dengan sampah anorganik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah menyebabkan beban penanganan sepenuhnya bertumpu pada petugas kebersihan kabupaten/kota, yang jumlahnya tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya kota/kabupaten yang berpartisipasi dalam Program Adipura Nasional. Saat ini, hanya 8 kota yang menjadi peserta, sementara 9 kota lainnya belum dapat berkompetisi karena keterbatasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah, termasuk minimnya dukungan pendanaan dari APBD. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terbatas semakin memperparah kondisi, karena sebagian besar sampah langsung ditimbun, hanya sebagian kecil yang dapat direduksi oleh pemulung. Apabila TPA berhenti beroperasi, penumpukan sampah di lingkungan perkotaan tidak dapat dihindari.

Selain itu, biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA terus meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar, serta tingginya biaya perawatan armada pengangkut. Kesulitan memperoleh lahan baru untuk TPA juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat penolakan masyarakat terhadap lokasi pembuangan sampah di wilayahnya. Rendahnya pemahaman dan penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) turut

memperburuk kondisi, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat semakin melimpah, menimbulkan TPA liar, dan mencemari lingkungan.

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, timbulan sampah di Provinsi Sumatera Selatan mencapai sekitar 6 ribu ton per hari atau setara 2 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola dan masuk ke TPA baru sekitar 1,8 ribu ton per hari, sedangkan sisanya, sekitar 4,3 ribu ton per hari, belum tertangani. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan timbulan sampah merupakan isu krusial yang harus menjadi prioritas dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pencemaran Air Sungai

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di Sumatera Selatan trend target kualitas air mengalami penurunan. Pada Tahun 2024 dibandingkan dengan hasil Tahun 2023. Hal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pemantauan keseluruhan terindikasi bahwa parameter pencemar bersumber dari aktifitas/kegiatan masyarakat seperti pertanian/ perkebunan dan pertambangan meningkat, terlihat pada pemberian kontribusi terbesar dalam pemantauan kualitas air adalah parameter TSS, BOD, COD, Deterjen, Colliform Tinja, Total Colliform, Conductivity, Chlorin, Phenol, Phosphate, NO₃-N, Sulfida dan Cyanida.

Selain itu, dengan kondisi jumlah sumber daya alam melimpah terutama potensi sumber daya energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan *Coal Bed Methan* (CBM) serta energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro dapat menimbulkan permasalahan tersendiri jika tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan Penambangan batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), merkuri (Hg), asam sianida (HCN), mangan (Mn), asam sulfat (H₂SO₄), dan timbal (Pb). Hg dan Pb

merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

Melihat realitas di lapangan bahwa dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dipandang secara utuh (comprehensif) mulai dari kawasan hulu sampai ke hilir dalam tatanan ekosistem, hal ini untuk memudahkan penentuan daya topan sungai, keterpaduan perencanaan dari hulu sampai ke hilir perlu melibatkan seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas dasar One River One Management.

4. Alih Fungsi Lahan

Pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki kawasan lindung dengan tutupan lahan vegetasi yang mendominasi hingga 31.543.859,25 hektar (94,96%), diikuti oleh kawasan lindung dengan tutupan badan air seluas 923.992,73 hektar (2,78%), tanah terbuka seluas 509.942,85 hektar (1,54%), dan area terbangun 239.325,41 hektar (0,72%). Selain itu, kawasan hutan di Sumatera Selatan mencapai total 8.676.933,54 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan Taman Nasional Laut. Dari keseluruhan kawasan tersebut, fungsi hutan terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luasan 1.694.115,26 hektar, sedangkan yang terkecil adalah Taman Wisata Alam dengan luasan hanya 223,31 hektar.

Sementara itu, penggunaan lahan utama di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menunjukkan dominasi pada lahan kering (3.279.894 hektar), disusul oleh lahan non-pertanian (1.806.058 hektar), lahan hutan (1.502.000 hektar), lahan perkebunan (1.487.211 hektar), lahan sawah (513.580 hektar), serta badan air (86.922 hektar). Pola penggunaan lahan tersebut menggambarkan adanya tekanan terhadap kawasan hutan dan ekosistem alami akibat alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan ekonomi.

Permasalahan yang timbul dari pembukaan dan alih fungsi lahan adalah berkurangnya vegetasi yang memiliki peran penting sebagai penyedia oksigen, penyangga ekosistem, dan pengatur siklus hidrologi. Hilangnya tutupan vegetasi berdampak pada kerusakan lingkungan, terancamnya keseimbangan ekosistem, meningkatnya risiko bencana alam, serta mempercepat laju perubahan iklim dan pencemaran udara. Alih fungsi lahan juga berkontribusi terhadap meningkatnya aliran permukaan dan debit

puncak outlet Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga meningkatkan potensi banjir terutama di wilayah tengah dan hilir. Selain itu, pengolahan lahan yang intensif membuat tanah semakin keras, menurunkan kemampuan infiltrasi, dan memperburuk kerentanan lingkungan.

5. Konflik Agraria

Permasalahan konflik agraria di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Konflik ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih pemanfaatan ruang, ketidakjelasan status kepemilikan, keterlambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta lemahnya penatagunaan tanah. Kondisi ini sering memunculkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang pada akhirnya menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan secara umum telah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelayanan pertanahan. Namun demikian, masih diperlukan penajaman kegiatan agar lebih fokus pada isu strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat. Indikator kinerja perlu disempurnakan agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), serta koordinasi lintas sektor perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola pertanahan.

Kebijakan nasional yang menjadi acuan meliputi:

- RPJMN Tahun berjalan
- Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Berdasarkan telaahan tersebut, fokus kebijakan nasional yang relevan dengan kewenangan provinsi adalah:

- 1) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota, khususnya pada DAS prioritas dan kawasan strategis provinsi.
- 2) Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan regional, termasuk penguatan sistem TPA regional dan pengurangan sampah.
- 3) Pengendalian perubahan iklim berbasis wilayah, melalui inventarisasi emisi GRK tingkat provinsi dan implementasi RAD-GRK.
- 4) Peningkatan kinerja ketaatan lingkungan (compliance) terhadap pelaku usaha skala besar/strategis.
- 5) Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan lintas wilayah dan aset pemerintah provinsi.

Telaahan ini menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan yang berorientasi pada isu strategis daerah seperti:

- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
- Degradasi kualitas air sungai (Musi dan anak sungai)
- Pengelolaan sampah regional
- Konflik dan pemanfaatan lahan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup provinsi yang berkelanjutan
2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan lintas wilayah
3. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib dan mendukung pembangunan daerah
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan perangkat daerah

Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
 - a. Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi
 - b. Catatan: fokus pada komponen air, udara, dan tutupan lahan
2. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - a. Indikator: Persentase penurunan beban pencemaran air dan udara
 - b. Indikator tambahan: jumlah titik pantau memenuhi baku mutu
3. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan
 - a. Indikator: Persentase ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan
4. Meningkatnya pengelolaan sampah regional
 - a. Indikator: Persentase penanganan sampah regional / dukungan sistem regional
5. Meningkatnya penyelesaian permasalahan pertanahan
 - a. Indikator: Persentase fasilitasi penyelesaian konflik/permohonan pertanahan lintas wilayah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - a. Indikator: Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

- 1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
- 2) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 3) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 4) Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- 5) Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- 6) Program Penatagunaan Tanah
 - Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan BLUD
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
 - Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 6) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
 - Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Provinsi
 - 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
 - 10) Program Pengelolaan Persampahan
 - Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN								
1	2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diselesaikan tepat waktu		Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum			Sumatera Selatan	APBD	70.000.000,00
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum di Wilayah Provinsi	Persentase Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan	100%	Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan di wilayah provinsi yang ditetapkan			Sumatera Selatan	APBD	70.000.000,00
	2.10.03.1.01.0003	- Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100%	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	2 Dokumen	Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OP D yang membidangi Pertanahan	Sumatera Selatan	APBD	70.000.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah data rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	100%	Jumlah Dokumen data rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	1 Dokumen	Instansi yang memerlukan tanah, Instansi/OP D yang membidangi Pertanahan	Prov. Sumsel	APBD	40.000.000,00
		Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi	100%	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi	1 Dokumen	Instansi yang memerlukan tanah,	8 Kab/Kota (Kab. OKUS, Kab. OKUT,	APBD	30.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Tanah untuk PPSN	Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN		Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitas Percepatan Tanah		Instansi/OPD yang membidangi Pertanahan	Kab. OKI, Kab. OI, Kab. ME, Kab. Prabumulih, Kab. MUBA, Kab. Banyuasin)		
2	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan			4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)	APBD	40.000.000,00
	2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	100%	Terlaksananya mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi			4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)	APBD	40.000.000,00
	2.10.04.1.01.0006	- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%	Jumlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Berita Acara	Masyarakat dan Badan Usaha	4 Kab/Kota (MURA, MURATARA, ME, LAHAT)	APBD	40.000.000,00
3	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			Sumatera Selatan	APBD	60.000.000,00
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah	100%	Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk			Sumatera Selatan	APBD	60.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi		pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi					
	2.10.05.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	Instansi/OP D yang membidangi pertanahan, Masyarakat	Kab/Kota dalam Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
	2.10.05.1.01.0002	- Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	1 Laporan	Masyarakat	Palembang	APBD	20.000.000,00
	2.10.05.1.01.0003	- Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesainya permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi	100%	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	Masyarakat	Palembang	APBD	20.000.000,00
		Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Tersusunnya Laporan Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	Jumlah Laporan Ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	1 Laporan	Masyarakat	Palembang	APBD	20.000.000,00
4	2.10.06	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)			Sumatera Selatan	APBD	60.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Maksimum dan Tanah Absentee							
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	100%	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Sumatera Selatan	APBD	60.000.000,00
	2.10.06.1.01.0002	- Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Perusahaan/ Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat	Sumatera Selatan	APBD	20.000.000,00
	2.10.06.1.01.0003	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kerja sama penataan akses dalam rangka reforma agraria dalam 1 (satu) provinsi	100%	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	1 Berita Acara	Perusahaan/ Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat	Sumatera Selatan	APBD	20.000.000,00
	2.10.06.1.01.0005	- Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kanwil BPN provinsi dalam pelaksanaan	100%	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	Perusahaan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PUBMTR,	Sumatera Selatan	APBD	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			legalisasi aset dan redistribusi tanah				Dinas PMPTSP dan Instansi terkait dan Kantor Wilayah BPN Wilayah			
5	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	100%	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong			Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	60.000.000,00
	2.10.08.1.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian tanah kosong	100%	Terlaksananya penyelesaian tanah kosong			Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.10.08.1.01.0001	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	1 Laporan	Perusahaan/ Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat	Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.10.08.1.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	Terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong			Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.10.08.1.02.0001	- Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100%	Jumlah laporan tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang diinventarisasi	1 Laporan	Perusahaan/ Masyarakat, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dan Kementerian ATR Badan Bank Tanah (BTT) Pusat	Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	100%	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah			Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.10.10.1.01	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Terlaksananya Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perusahaan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PUBMTR, Dinas PMPTSP dan Instansi terkait dan Kantor Wilayah BPN Wilayah	Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.10.10.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi	100%	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	Perusahaan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PUBMTR, Dinas PMPTSP dan Instansi terkait dan Kantor Wilayah BPN Wilayah	Dalam Provinsi dan Luar Daerah	APBD	30.000.000,00
	2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
7	2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase Dokumen PEP yang tersusun 2. Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun 3. Persentase	100%	1. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan, Eva luasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah 2. Administrasi			Prov. Sumsel	APBD	43.517.602.131,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana 4. Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana 5.		Keuangan Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian 4. Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah					
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Prov. Sumsel	APBD	188.000.000,00
	2.11.01.1.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	16.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	100%	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	16.000.000,00
	2.11.01.1.01.0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	72.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	100%	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LPPD	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LKPJ	Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	100%	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	16.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan LKjIP	Tersedianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	100%	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	16.000.000,00
	2.11.01.1.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Sumatera Selatan	APBD	100.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kinerja Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup pada Kabupaten/Kota	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	17 Kab/Kota	APBD	60.000.000,00
		Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0%	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	40.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Prov. Sumsel	APBD	15.830.011.320,00
	2.11.01.1.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 OB	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	15.701.563.320,00
		Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	100%	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan	61 OB	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	6.114.620.762,00
		Gaji dan Tunjangan PPPK	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PPPK	100%	Jumlah PPPK yang menerima Gaji dan Tunjangan	59 OB	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	3.501.090.558,00
		Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS	100%	Jumlah PNS yang menerima Tambahan Penghasilan	61 OB	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	6.085.852.000,00
	2.11.01.1.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	98.448.000,00
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	98.448.000,00
	2.11.01.1.02.0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	PersentaseTerlak sananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Prov. Sumsel	APBD	6.000.000,00
	2.11.01.1.03.0001	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	2.000.000,00
	2.11.01.1.03.0005	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	2.000.000,00
	2.11.01.1.03.0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	2.000.000,00
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Prov. Sumsel	APBD	90.000.000,00
	2.11.01.1.05.0002	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket			APBD	0,00
	2.11.01.1.05.0003	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
		Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	Terlaksananya Penyusunan ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	100%	Jumlah Dokumen ANJAB ABK dan EVAJAB ASN	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	10.000.000,00
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan	Terlaksananya Penilaian	100%	Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					
	2.11.01.1.05.0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	60.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM	100%	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	6 Orang	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
		Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat PIM	1 Orang	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Prov. Sumsel	APBD	481.191.415,00
	2.11.01.1.06.0001	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	4.800.000,00
	2.11.01.1.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Peralatan Kantor	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	31.232.000,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	17.232.000,00
		Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	100%	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	1 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	12.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Plakat/ Souvenir	Tersedianya Plakat/Souvenir	100%	Jumlah Plakat dan Souvenir yang disediakan	1 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	2.000.000,00
	2.11.01.1.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	62.000.000,00
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	Jumlah Paket Makanan dan Minuman yang disediakan	2 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	62.000.000,00
	2.11.01.1.06.0005	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	10.000.000,00
	2.11.01.1.06.0006	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	10.000.000,00
	2.11.01.1.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	293.159.415,00
		Perjalanan Dinas Rutin Kantor	Terlaksananya Perjalanan Dinas Rutin Kantor	100%	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Rutin Kantor	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	240.000.000,00
		Rapat Koordinasi Teknis	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis	100%	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Teknis	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	53.159.415,00
	2.11.01.1.06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	10.000.000,00
	2.11.01.1.06.0011	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	60.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	Tersedianya barang atau aset yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah				APBD	0,00
	2.11.01.1.07.0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			APBD	0,00
	2.11.01.1.07.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 Unit			APBD	0,00
	2.11.01.1.07.0005	- Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100%	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Unit			APBD	0,00
	2.11.01.1.07.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit			APBD	0,00
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	Tersedianya berbagai jasa pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti jasa kebersihan, jasa transportasi, jasa komunikasi, listrik dan air, serta jasa keamanan			Prov. Sumsel	APBD	929.879.396,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.11.01.1.08.0001	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	2.000.000,00
	2.11.01.1.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	307.089.396,00
	2.11.01.1.08.0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	1.600.000,00
	2.11.01.1.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	619.190.000,00
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	100%	Jumlah tenaga Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran yang disediakan	10 OB	PPPK Paruh Waktu	Prov. Sumsel	APBD	341.510.000,00
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Jumlah Laporan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	250.000.000,00
		Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Tersedianya Jasa Tutor SKJ	100%	Jumlah Laporan Jasa Tutor SKJ yang disediakan	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	7.680.000,00
		Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel	100%	Jumlah Laporan Pengelola Informasi dan Dokumentasi oleh PPID DLHP Prov. Sumsel yang disediakan	1 Laporan	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	Persentase jumlah BMD yang dipelihara, yang dapat diukur melalui berbagai			Prov. Sumsel	APBD	224.360.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		indikator seperti kondisi teknis aset, masa pakai aset, dan efektivitas pemeliharaan					
	2.11.01.1.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	12.000.000,00
	2.11.01.1.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	108.360.000,00
	2.11.01.1.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	24.000.000,00
	2.11.01.1.09.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	80.000.000,00
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	100%	Peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan			Prov. Sumsel	APBD	25.768.160.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					efektivitas layanan publik					
	2.11.01.1.10.0001	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	ASN DLHP Prov. Sumsel	Prov. Sumsel	APBD	25.768.160.000,00
8	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP			Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi	100%	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis			Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
	2.11.02.1.02.0009	- Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	100%	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
9	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan 4. Indeks Kualitas Air Laut 5. Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif 6. Persentase Penurunan		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Sumatera Selatan	APBD	1.066.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Emisi GRK Tahunan							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Terlaksanannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Sumatera Selatan	APBD	632.000.000,00
	2.11.03.1.01.0001	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100%	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Prov. Sumsel	APBD	122.000.000,00
		Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	Tersusunnya Dokumen Uji Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan	100%	Jumlah Dokumen Uji Pengendalian kerusakan lingkungan sektor pertambangan yang disusun	1 Dokumen	Kegiatan/ usaha pertambangan	6 Kab/Kota (Kab ME, Kab Lahat, Kab MURATARA, Kab MUBA, Kab Banyuasin, dan Kab OKU)	APBD	40.000.000,00
		Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Uji Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi	100%	Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Evaluasi Kesesuaian DLH Kewenangan Provinsi yang disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	17 Kab/Kota	APBD	32.000.000,00
		Pembinaan dan Monitoring Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	Tersusunnya Dokumen Uji Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi	100%	Jumlah Dokumen Uji Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai AMDAL Kab/kota	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	17 Kab/Kota	APBD	50.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penilai AMDAL Kab/kota							
	2.11.03.1.01.0002	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	DLH Kab/Kota, Dunia Usaha, Komunitas, Masyarakat	Sumatera Selatan	APBD	240.000.000,00
		Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PROKLIM)	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Meningkatnya Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Upaya Inventarisasi GRK, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	Komunitas Masyarakat, DLH Kab/Kota, Dunia Usaha	17 Kab/Kota	APBD	100.000.000,00
		Inventarisasi Bahan Perusak Ozon (BPO)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Bahan Perusak Ozon dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Bahan Perusak Ozon dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	DLH Kab/Kota	2 Kab/Kota (Kota Palembang dan Kota Prabumulih)	APBD	10.000.000,00
		Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	100%	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	DLH Kab/Kota dan Dunia Usaha	6 Kab/Kota (Kab. ME, Kab. MUBA, Kab. OKI, Kab. Lahat, Kab. Banyuasin dan Kab. OKU)	APBD	60.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kampanye pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	Terlaksananya Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kampanye dan evaluasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kegiatan/usaha perkebunan dan kehutanan	11 Kab/Kota (Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MUBA, Kab ME, Kab PALI, Kab MURATARA, Kab MURA, Kab OI, Kab OKU, Kab OKUT, Kab Lahat, dan OKUS)	APBD	20.000.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi	100%	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di lahan konsesi yang dilaksanakan	1 Dokumen	Kegiatan/usaha perkebunan dan kehutanan	11 Kab/Kota (Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MUBA, Kab ME, Kab PALI, Kab MURATARA, Kab MURA, Kab OI, Kab OKU, Kab OKUT, Kab Lahat, dan OKUS)	APBD	50.000.000,00
	2.11.03.1.01.0004	- Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	100%	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	242 Paket	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	99.864.000,00
		Pengujian Parameter Analisa Air Laut	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas Air Laut	100%	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Analisa Air Laut yang dilaksanakan	20 Paket	Kab/Kota	2 Kab/Kota (Banyuasin, OKI)	APBD	14.700.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengujian Parameter Kualitas Udara	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas Udara	100%	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Kualitas Udara yang dilaksanakan	34 Paket	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	4.080.000,00
		Pengujian Parameter Kualitas Air	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas Air	100%	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter Kualitas Air yang dilaksanakan	188 Paket	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	81.084.000,00
	2.11.03.1.01.0009	- Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	100%	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	179 Lokasi	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	170.136.000,00
		Pemantauan Kualitas Air Sungai	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai	100%	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi yang Dilaksanakan	91 lokasi titik sampling	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	68.916.000,00
		Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara Ambien	100%	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi yang Dilaksanakan	68 Lokasi titik sampling	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	85.920.000,00
		Pemantauan Kualitas Air Laut	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Laut	100%	Jumlah Data dan Informasi Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi	20 Lokasi titik sampling	Kab/Kota	2 Kab/Kota (Banyuasin, OKI)	APBD	15.300.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					yang Dilaksanakan					
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
	2.11.03.1.02.0001	- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota	100%	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Perusahaan dan Masyarakat	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
		Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Lingkungan Hidup	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Perusahaan dan Masyarakat	Prov. Sumsel	APBD	30.000.000,00
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Sumatera Selatan	APBD	404.000.000,00
	2.11.03.1.03.0006	- Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota	100%	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota	2 Kegiatan	Kelompok Masyarakat dan OPD Teknis terkait	7 Kab/Kota (OKI, MUBA, Banyuasin, MURA, MURATARA,	APBD	404.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			yang dilaksanakan		yang dilaksanakan		dengan kegiatan Restorasi Gambut	PALI, Muara Enim)		
		Pendampingan Tim Restorasi Gambut	Terlaksananya Pendampingan Tim Restorasi Gambut	100%	Jumlah Kegiatan Pendampingan Tim Restorasi Gambut yang dilaksanakan	1 kegiatan	Kelompok Masyarakat dan OPD Teknis terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut	7 Kab/Kota (Kab MUBA, Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MURA, Kab MURATARA, Kab ME dan Kab PALI)	APBD	380.000.000,00
		Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi	100%	Jumlah Kegiatan Monitoring pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut di lahan konsesi yang dilaksanakan	1 kegiatan	Kelompok Masyarakat dan OPD Teknis terkait dengan kegiatan Restorasi Gambut	7 Kab/Kota (Kab MUBA, Kab OKI, Kab Banyuasin, Kab MURA, Kab MURATARA, Kab ME dan Kab PALI)	APBD	24.000.000,00
		Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut	Terlaksananya Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut	100%	Jumlah Kegiatan Pembinaan masyarakat dan desa peduli gambut yang dilaksanakan	0 kegiatan				0,00
10	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				APBD	45.000.000,00
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100%	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			Sumatera Selatan	APBD	45.000.000,00
	2.11.04.1.01.0001	- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman	100%	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan	0 Dokumen				0,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keanekaragaman Hayati	n Hayati yang disusun		Kehati yang Disusun					
	2.11.04.1.01.0004	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	100%	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha	Taman Kehati yang Dikelola	Jakabaring Sport Centre	APBD	15.000.000,00
	2.11.04.1.01.0006	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20 Orang	ASN DLH Kab/Kota di Provinsi Sumsel	DLHP Provinsi Sumsel	APBD	30.000.000,00
11	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100%	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				APBD	20.000.000,00
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				APBD	20.000.000,00
	2.11.05.1.01.0002	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, and/atau Penimbunan yang bukan kewenangan Provinsi serta	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan	1 Dokumen	DLH Kab/Kota	Kab/Kota	APBD	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Provinsi yang sesuai kewenangannya.		Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya					
12	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan				APBD	100.000.000,00
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			Sumatera Selatan	APBD	100.000.000,00
	2.11.06.1.01.0006	- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	Seluruh perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	100%	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	Badan Usaha	17 Kab/Kota	APBD	100.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Lingkungan Hidup								
13	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	68,44	Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup			Prov. Sumsel	APBD	72.000.000,00
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan , Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				APBD	72.000.000,00
	2.11.08.1.01.0003	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	100%	Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pelak u Usaha/Kegiatan yang Terlibat	15 orang	Lembaga Masyarakat Kab/Kota	Prov. Sumsel	APBD	12.000.000,00
		Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS)	Terlaksananya Kampanye Lingkungan Hidup (HLHS)	100%	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	0 Masyarakat			APBD	0,00
		Pelaksanaan <i>World Clean-Up Day</i> (WCD)	Terlaksananya World Clean-Up Day (WCD)	100%	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat	0 Masyarakat			APBD	0,00
		Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Terlaksananya Hari Peduli	100%	Jumlah Masyarakat/ Kelompok	0 Masyarakat			APBD	0,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sampah Nasional (HPSN)		Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Terlibat					
		Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	100%	Terlaksananya Inventarisasi lembaga masyarakat/kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup	15 Orang	Lembaga Masyarakat Kab/Kota	Prov. Sumsel	APBD	12.000.000,00
	2.11.08.1.01.0005	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala propinsi yang terdaftar di provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDM nya	100%	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Orang	Perusahaan/ Kegiatan Usaha	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
		Pelatihan Diklat dan Bimbingan Teknis Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Terlaksananya Pelatihan Diklat dan Bimbingan Teknis Lingkungan Hidup dan Pertanahan	100%	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Orang	Perusahaan/ Kegiatan Usaha	Prov. Sumsel	APBD	20.000.000,00
	2.11.08.1.01.0007	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan	100%	Jumlah Pendampingan Pembinaan	1 Dokumen	Pelajar Anggota Pramuka	Kora Palembang	APBD	40.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup		Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		pada Sekolah Adiwiyata			
		Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	Terlaksananya Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	100%	Jumlah Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru yang dilaksanakan	1 Dokumen	Pelajar Anggota Pramuka pada Sekolah Adiwiyata	Kora Palembang	APBD	40.000.000,00
14	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			17 Kab/Kota	APBD	270.000.000,00
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	100%	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi			17 Kab/Kota	APBD	270.000.000,00
	2.11.09.1.01.0001	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	DLH Kab/Kota, Sekolah, Dunia Usaha/Perusahaan dan Masyarakat	17 Kab/Kota	APBD	270.000.000,00
		Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kota Sehat Adipura	100%	Jumlah Kab/Kota yang menerima Penghargaan Adipura	3 Kab/Kota	Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	60.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata	100%	Jumlah Dunia Pendidikan/ Sekolah Adiwiyata yang Dinilai	35 Sekolah	Dunia Pendidikan/ Sekolah- Sekolah yang dicalonkan untuk menjadi sekolah adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan	17 Kab/Kota	APBD	40.000.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata	100%	Jumlah Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri yang di Evaluasi dan di Monitoring	30 Sekolah	Sekolah Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Mandiri di Provinsi Sumatera Selatan	17 Kab/Kota	APBD	20.000.000,00
		Penghargaan Mitra Pembina Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Mitra Pembinaan Sekolah Adiwiyata	100%	Jumlah Perusahaan yang membina sekolah adiwiyata	2 Perusahaan	Dunia Usaha/Perusahaan	17 Kab/Kota	APBD	20.000.000,00
		Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)	100%	Jumlah Perusahaan Yang Dinilai	135 Perusahaan	Perusahaan/ Kegiatan Usaha	8 Kab/Kota (Kota Palembang, Kab. MUBA, Kab. MURATARA, Kab. MURA, Kab. OI, Kab. OKI, Kab. PALI, Kab. Lahat)	APBD	30.000.000,00
		Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalpataru)	Terlaksananya Apresiasi Bidang Lingkungan Hidup dan	100%	Jumlah Masyarakat/ Lembaga	1 orang	Masyarakat Peduli Lingkungan	Kabupaten/ Kota di Provinsi	APBD	20.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kehutanan (Kalpataru)		Masyarakat Yang Dinilai			Sumatera Selatan		
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	100%	Jumlah Dokumen IKPLHD Yang Disusun	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Prov. Sumsel	APBD	80.000.000,00
15	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup			Sumatera Selatan	APBD	90.000.000,00
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi	100%	Terlaksananya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Provinsi			Sumatera Selatan	APBD	90.000.000,00
	2.11.10.1.01.0005	- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan yang merupakan kewenangan provinsi	100%	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	3 Perkara	Masyarakat dan Badan Usaha	17 Kab/Kota	APBD	30.000.000,00
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	Persentase Penyelesaian	100%	Jumlah Penyelesaian Kasus	3 Perkara	Masyarakat dan Badan Usaha	17 Kab/Kota	APBD	30.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kasus Lingkungan		Lingkungan yang dilaksanakan					
	2.11.10.1.01.0007	- Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi yang dikelola	100%	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	6 Pengaduan	Masyarakat dan Badan Usaha	17 Kab/Kota	APBD	60.000.000,00
16	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	1. Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS) 2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	47%	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan			Sumatera Selatan	APBD	150.000.000,00
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100%	Terlaksananya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			Sumatera Selatan	APBD	150.000.000,00
	2.11.11.1.01.0010	- Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah regional	100%	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah regional	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	50.000.000,00
	2.11.11.1.01.0014	- Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan	100%	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota	17 Kab/Kota	APBD	100.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KELOMPOK SASARAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN
			INDIKATOR OUTPUT	TARGET INDIKATOR OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	TARGET INDIKATOR OUTCOME				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pengelolaan sampah di kabupaten/kota	pengelolaan sampah di kabupaten/kota		pengelolaan sampah di kabupaten/kota					
		Total								45.670.602.131,00

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan pertanahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kinerja, serta optimalisasi program dan kegiatan, diharapkan seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini demi terwujudnya Sumatera Selatan yang hijau, lestari, dan berdaya saing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan dapat memberikan arah yang jelas serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.